

BAB II

SIKAP DEMOKRATIS DAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Sikap Demokratis

1. Pengertian Sikap demokratis

Kata demokrasi memang sudah tidak asing terdengar ditelinga kita, karena kita adalah negara demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, Suparyanto (2009:2). Jadi demokrasi memiliki arti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maksudnya yaitu kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan untuk mengatur dan membuat Undang-Undang demi kesejahteraan masyarakat melalui wakil-wakil rakyat, Suparyanto (2009:1).

Sikap merupakan bentuk dari kepribadian seseorang dalam kehidupan sosialnya, karena setiap pribadi pasti memiliki sikap tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Sikap sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, karena sering kita jumpai jika seseorang tinggal dalam lingkungan yang baik, maka ia akan memiliki sikap yang baik, dan juga sebaliknya. Sikap demokratis merupakan sikap yang harus dibangun melalui pendidikan agar menjadi tradisi dan karakter sehingga sikap untuk memperlakukan setiap orang sama terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan seperti pendidikan demokratis (*democratis education*), ruang kelas yang demokratis (*democratic classroom*), pendekatan demokratis terhadap manajemen kelas, dan penyusunan organisasi kelas. Kelas dijadikan sebagai laboratorium demokrasi sangat dibutuhkan untuk menunjang perkembangan keaktifan siswa dikelas. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa penanaman sikap demokratis di kelas khususnya di dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu keharusan yang ditanamkan dalam proses pendidikan khususnya dalam ruang lingkup kecil yaitu kelas, yang melibatkan peran siswa sebagai warga kelas tersebut, sehingga diharapkan dapat mengemban kultur demokratis berkeadaban kepada siswa sejak dini sehingga tercipta siswa yang demokratis yang mau dan mampu hidup demokratis, sebagai generasi harapan dimasa mendatang yang mampu bertanggung jawab, Rosyanda, (2007:16).

Sikap demokratis dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, salah satunya musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Sikap demokratis dapat diartikan sebagai tindakan yang didasari pada nilai demokrasi. Sikap ini akan mendukung pelaksanaan dari prinsip demokrasi, wibowo (2012:101). Mekanisme demokratis dalam politik tidak sepenuhnya sama dengan mekanisme kepemimpinan Lembaga Pendidikan, namun secara substansi, sekolah yang demokratis adalah sekolah yang membawa semangat demokrasi pada perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini James A Beane dan Michael W. Apple (dalam Rosyanda, 2007:15-16) menjelaskan berbagai kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya sikap demokratis adalah:

- a. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.
- b. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
- c. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisa dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, masalah-masalah dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah.
- d. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.

- e. Terdapat pemahaman dan dapat berbagi serta mengembangkan cara-cara hidup demokratis.

Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain, Mustari (2011:167). Contoh sikap demokratis adalah seperti menghargai perbedaan, penyampaian pendapat dengan cara yang benar, serta menghargai keputusan musyawarah. Dilingkungan sekolah, sikap demokratis ditunjukkan dalam pemilihan ketua kelas yang melibatkan semua siswa dikelas untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan contoh sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti ; berusaha bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap sesama sehingga tidak dijauhi dalam pergaulan, membiasakan diri untuk bermusyawarah saat menghadapi suatu permasalahan, belajar untuk menghargai pendapat orang lain meski tidak sesuai dengan keinginan hati, berbicara dengan bahasa yang santun saat mengungkapkan pendapat sehingga tidak menyinggung orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, segera meminta maaf jika melakukan kesalahan, serta belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain.

Pendidikan demokrasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, karena keberhasilan suatu negara dalam menjalankan demokrasi ditentukan oleh pemerintahan yang demokrasi dan masyarakat yang mengembangkan nilai demokrasi dalam kehidupan, Yaumi (2014:101). Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang menerapkan sistem andragogi yaitu menuntut potensi, bakat dan minat siswa serta memfasilitasi keanekaragaman karakter siswa untuk melakukan suatu hal. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, tanpa membeda-bedakan siswa siswa yang pintar dan yang belum pintar, siswa yang rajin dan tidak rajin, semua harus memperoleh perlakuan yang sama. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sikap demokratis siswa di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kegiatan pembelajaran seperti pada mata

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu; Pengendalian diri (rasa egois), dan kurangnya rasa percaya diri dalam berpendapat, serta kurangnya rasa perhatian siswa terhadap pembelajaran, Zuliya Loka Sari (2016:68).

2. Nilai-Nilai demokratis

Demokrasi memiliki nilai-nilai, seperti hak-hak individu, kebebasan, keadilan, tujuan bersama. Di dalam Demokrasi bahwa seorang siswa sebagai warga negara yang terdidik akan mampu serta senantiasa memahami berbagai perbedaan, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta mampu mengambil keputusan dan bekerja sama dengan sesama, mampu memperoleh pengalaman kehidupan yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis (Zamroni, 2011:128-130). Nilai demokrasi seharusnya dijadikan cermin atau pandangan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana seorang individu dalam bersikap dan berperilaku. Nilai demokratis tersebut dapat dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut nilai-nilai demokrasi yang telah dikemukakan oleh Zamroni (dalam Safitri, 2015:62) ; Toleransi, Menghargai perbedaan pendapat, Memahami dan menghargai keberagaman masyarakat, Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, Pengendalian diri, Kemanusiaan dan keberagaman, Kepercayaan diri, Ketaatan pada peraturan yang berlaku.

Penanaman nilai demokrasi dapat dilakukan dilakukan sejak anak masih kecil. Pendidikan demokrasi pertama kali dilakukan di lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dalam kehidupannya, John Dewey (2012:168). Keluarga sangat mempengaruhi perkembangan nilai demokrasi dalam diri anak karena didalam keluarga hidup berbagai macam nilai demokrasi yang dilakukan setiap harinya. Keluarga hanya mampu membimbing anak sampai usia lima sampai tujuh tahun, setelah itu anak akan belajar mengembangkan dirinya diseolah. Sekolah bertugas mendidik anak untuk mengembangkan potensi dan nilai yang dibawa dari keluarga,

oleh karena itu sekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan siswa sesuai dengan keinginan masyarakat dan negara. Sekolah demokratis akan menanamkan nilai demokrasi dalam penyelenggaraan proses pembelajarannya. Pendidikan yang demokratis harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Pendidikan demokrasi dilakukan untuk mencetak penerus bangsa yang mempunyai nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya untuk dapat melanjutkan kelangsungan demokrasi dalam suatu negara, Zamroni (2001:9).

Penanaman nilai demokrasi hendaknya dilakukan kepada siswa sendiri mungkin untuk membentuk kepribadian anak. Pentransferan nilai dari generasi muda ke generasi terselenggara dengan membudayakan nilai kepada generasi yang lebih muda sedini mungkin yakni sejak anak-anak telah dibiasakan nilai yang berlaku dilingkungannya, (Afandi, 2011:10). Membangun budaya demokrasi tidak cukup dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, akan tetapi juga perlu mengenalkan atau mensosialisasikannya kepada masyarakat. Demokrasi tidak hanya sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai demokratis sangat penting bagi pembentukan karakter siswa sebagai warga negara, salah satu cara pembentukan karakter demokratis tersebut dilakukan melalui penanaman nilai demokrasi yang ditransformasikan oleh guru melalui kegiatan belajar mengajar, seperti memberi kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan atau mengemukakan pendapatnya.

3. Perilaku Demokratis

Sikap dan perilaku merupakan suatu yang berbeda, sikap merupakan kecenderungan mental seseorang, yang bertanggungjawab atas cara dia berpikir atau merasakan seseorang atau sesuatu. Sedangkan perilaku menyiratkan tindakan, gerakan atau reaksi tindakan seseorang individu, Mustari (2011:167). Lebih singkatnya adalah sikap merupakan cara berpikir dan perasaan batin seseorang, dan perilaku adalah bagaimana seseorang mengekspresikan sikap seseorang tersebut. Jadi kesimpulannya sikap demokratis merupakan bagaimana seseorang berfikir dan mengambil keputusan dalam bertindak berperilaku dalam melakukan sesuatu, dan perilaku demokratis adalah bagaimana seseorang dalam mengekspresikan atau bereaksi melalui sikap dan tanggapan terhadap suatu kondisi, karna pada dasarnya seseorang bertindak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sedang dialami.

Perilaku demokratis di sekolah seperti mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, saling menghargai dari berbagai suku, serta berinteraksi dan saling menjaga komunikasi yang baik dengan warga sekolah, Zuliya Loka Sari (2016:68). Kehidupan demokrasi tidak datang secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini terjadi melalui proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan, untuk itu dukungan sosial dan lingkungan demokratis adalah mutlak dibutuhkan. Maka dari itu, untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai demokrasi yang diyakini dan dipraktikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Perilaku demokratis perlu ditanamkan pada siswa sejak dini khususnya didalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, perilaku-perilaku demokratis tersebut meliputi :

a) Toleransi

Toleransi merupakan suatu perilaku yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan

kepercayaannya, hak menjalin hubungan sosial mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dimasyarakat maupun hak-hak yang lain.

b) Menghargai Perbedaan pendapat

Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Perilaku menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

c) Memahami dan Menyadari Keanekaragaman Masyarakat

Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung tinggi dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul dimasyarakat adalah perpecahan.

d) Terbuka dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai dan Martabat Manusia

Perilaku terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu sama lain.

e) Pengendalian Diri

Pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

f) Kemanusiaan dan Kebersamaan

Perilaku kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi

sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

g) Kepercayaan Diri

Perilaku percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

h) Ketaatan pada Peraturan Yang Berlaku

Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama, yang menjadi modal utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

B. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi Djamarah dan Zaim (2010:10). Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru dalam mengembangkan kreativitas berpikir mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengontruksikan pengetahuan baru. Pembelajaran juga dapat menjadi sebuah upaya meningkatkan

penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Bisa disimpulkan bahwa definisi pembelajaran adalah sebuah proses interaksi guru dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik.

Dalam pendidikan siswa diharapkan dapat melalui proses yang baik, di dalam proses pembelajaran guru dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan, guru juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi siswa serta memiliki akhlak yang mulia. Upaya guru untuk memudahkan belajar siswa, tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien, ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidikan mempunyai peran penting bagi perkembangan dan perwujudan dari individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 Tentang tujuan Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, salah satu mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan warga negara yang demokratis yaitu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan usaha dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warganegara yang baik dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mengembangkan kompetensi seperti memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan, memiliki keterampilan,

berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab, memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Zulfadrial (2012:26). Untuk mencapai tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut, maka harus ada kegiatan pembelajaran yang dapat mewujudkannya. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas yang bermutu baik dalam proses maupun mencapai lulusan dalam dunia pendidikan. Proses belajar sangat bergantung pada kemampuan seorang guru dalam merancang dan melaksanakan suatu pembelajaran.

Belajar yang efektif dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan intruksional yang ingin dicapai, belajar mengajar juga merupakan kegiatan yang bertujuan, artinya suatu kegiatan yang terikat oleh tujuan, terarah pada tujuan dan dilaksanakan khusus untuk mencapai tujuan itu. belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang buruk, Purwanto (2013:85). Belajar juga merupakan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan dan meniru, Sardiman (2014:20).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan belajar mengajar di dalam pembelajaran terjadi karena adanya interaksi seseorang, baik siswa dengan guru maupun siswa dengan teman sekelas di dalam lingkungan yang akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada berbagai aspek di antaranya seperti pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan siswa selama mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan, membekali, membentuk siswa menjadi

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:100). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menekankan pada isi yang mengandung nilai-nilai demokratis. Karakter kewarganegaraan merupakan sikap dan kebiasaan berpikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial secara sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pembelajaran yang mengarah kepada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara yaitu Pancasila. Menciptakan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inspiratif, interaktif, dalam pembelajaran PPKn tidaklah mudah, Sebagian besar siswa menganggap mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang hanya mementingkan hafalan saja. Secara garis besar, peran pembelajaran PPKn ini diupayakan agar dapat mempersiapkan siswa memiliki kepribadian yang mantap, yaitu membantu siswa agar memiliki sikap menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama, karena pada pembelajaran PPKn diberikan nilai-nilai bagaimana bertingkah laku sesuai dengan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi utama untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi

peserta didik yaitu bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, capat, kreatif dan mandiri, Supandi (2007:1).

“Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory proces”. (Pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk didalamnya (persekolahan, pengajaran dan belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut), Kerr (1999:6). Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini siswa untuk menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyiapkan siswa yang mempunyai pengetahuan kecakapan dan nilai-nilai yang diperlukan dan bertanggung jawab sebagai warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

a. Visi Dan Misi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari siswa sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and*

character building) dan perberdayaan warga negara. Misi dari pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini yaitu membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Zulfadrial (2011:25).

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyiapkan siswa yang mempunyai pengetahuan, kecakapan sebagai warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

b. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan Ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah sebagai berikut;

- 1) Agar peka terhadap berbagai masalah yang ada dilingkungannya
 - 2) Agar tanggap terhadap berbagai permasalahan terhadap berbagai dimensi kebijakan publik
 - 3) Agar mampu memecahkan salah satu masalah yang paling krusial dilingkungannya secara sistematis dan kolektif dengan cara pandang sebagai warga negara yang demokratis
- Agar mampu mengambil keputusan kolektif sebagai rekomendasi terkait kebijakan publik yang relevan

- 4) Agar mampu mensosialisasikan usulan kebijakan yang di rekomendasikan melalui koridor dan instrumen demokrasi yang ada dilingkungannya

Tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah agar siswa mampu : berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara bermutu, bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Hamid darmadi (2016:25).

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah agar siswa memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, kreatif, berpartisipasi secara bertanggung jawab, memiliki watak dan kepribadian yang baik yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain mempunyai visi misi dan tujuan, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga mempunyai ruang lingkup. Secara garis besarnya ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek utama sebagai berikut :

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi : hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara republik Indonesia, partisipasi

dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- 2) Norma hukum dan peraturan, meliputi : tertib dalam kehidupan berkeluarga, tertib disekolah, norma yang berlaku dimasyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia, meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional, HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara, meliputi : hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warganegara.
- 5) Konstitusi negara, meliputi : proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik, meliputi : pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam demokrasi.
- 7) Pancasila, meliputi : kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi : kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pancasila sebagai ideologi terbuka.

Hamid Darmadi (2016:35).

Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu dikembangkan sebagai pusat kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, yang mampu memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demokratis. Maka mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus berfungsi sebagai sarana pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dalam kehidupan demokratis.

3. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan maksud untuk tidak menghindari duplikat. Selain itu juga memunjukkan bahwa topik yang akan diteliti oleh orang lain dalam konteks yang sama, beberapa penelitian yang relevan yang dipaparkan dan berkaitan dengan sikap demokratis di sekolah dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rini Yuliana, (2013) dengan judul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 3 GRINGSING BATANG” dengan hasil penelitian sebagai berikut :
 - 1) Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang adalah nilai-nilai : Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang telah dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi.

- 2) Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang, yaitu :
- a) Faktor pendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu : (1) kurikulum, perubahan kurikulum dengan dimasukkannya pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran berdampak positif bagi pembelajaran PKn di SMPN 3 Gringsing batang; (2) sarana dan prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran; (3) budaya sekolah yang dianut di SMPN 3 Gringsing Batang menekankan pada budaya disiplin, dan; (4) kepemimpinan kepala SMPN 3 Gringsing batang dapat dijadikan panutan, mengingat sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
 - b) faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn, yaitu : (1) kurangnya dukungan orang tua yang sibuk bekerja, menyebabkan anak kurang mendapatkan bimbingan hingga menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajarnya; (2) keterbatasan biaya masih menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pembelajaran, terkadang guru masih mengeluarkan biaya sendiri untuk menyusun media pembelajaran; (3) lingkungan masyarakat, perilaku masyarakat yang negatif dapat memberi pengaruh buruk bagi pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi seorang siswa, dan; (4) perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.
- b. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Shelina, (2019) dengan judul “PERAN PEMBELAJARAN PKn DALAM MEMBENTUK SIKAP DEMOKRATIS UNTUK MENINGKATKAN *CIVIC DISPOSITION* SISWA” dengan hasil penelitian sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 4 Kotabumi. Hasil penelitian dalam variabel sikap demokratis menunjukkan yang termasuk kategori tidak berperan sebesar 12% menyatakan bahwa peran pembelajaran PKn tidak berperan secara optimal sehingga menyebabkan masih adanya siswa yang belum memiliki sikap demokratis, seperti malas dalam mengemukakan pendapat, tidak berminat dalam ekstrakurikuler disekolah, dan belum mengamalkan nilai-nilai demokratis yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sebagai warga negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, siswa masih menganggap bahwa pembelajaran PKn hanyalah sebatas materi dalam kehidupan sehari-hari. Kategori cukup berperan sebesar 59% menyatakan bahwa peran pembelajaran PKn cukup berperan dalam membentuk sikap demokratis pada siswa, seperti mengamalkan nilai-nilai demokratis pada siswa, seperti mengamalkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, berani dalam mengemukakan pendapat dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Para siswa mulai terbiasa untuk mengamalkan nilai-nilai demokratis yang didapat melalui pembelajaran di kelas, aktif dalam berdiskusi, dan mengamalkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, siswa hanya melakukan dalam konteks yang tidak rutin atau kadang-kadang, hanya sebatas mengikuti teman, ataupun hanya tidak ingin mengurangi nilai sikap dan nilai mata pelajaran disekolah.
- 2) Berdasarkan wawancara dan penjelasan dari siswa dan guru di SMA Negeri 4 Kotabumi, yaitu guru menjelaskan bahwa dalam pembelajaran PKn juga mengajarkan dalam proses belajar kepada siswa untuk berani dalam mengemukakan pendapat, memberikan penjelasan bahwa mata pelajaran PKn bukan hanya materi semata, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga sudah optimal dengan menggunakan metode pembelajaran yang

kreatif agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena pada mulanya siswa memang kurang memiliki sikap *civic disposition* yang tinggi, seperti; kerjasana, berpendapat, berpartisipasi, memiliki keadaban, disiplin terhadap diri sendiri, memiliki pikiran yang terbuka, dan juga toleransi terhadap perbedaan, maka dengan pembelajaran PKn ini dapat membentuk sikap demokratis dan meningkatkan *civic disposition* untuk menjadi warga negara yang demokratis